



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 26 Oktober 2020

Halaman: 1

Belum Pulih, Ribuan Pekerja Masih Dirumahkan

Mayoritas Ada di Sektor Pariwisata

JOGJA, Radar Jogja - Sebanyak 2.500 pekerja terdampak Covid-19 di Kota Jogja, terutama yang dirumahkan, belum 100 persen pulih dan kembali bekerja. Mayoritas yang terupdate hingga September lalu adalah buruh atau pekerja di sektor pariwisata.

Sekretaris DPC KSPSI Kota Jogja Denta Julian mengatakan, pekerja sektor pariwisata yang hingga saat ini belum pulih sepenuhnya khususnya di sektor informal, baik di bidang perhotelan, restoran, travel, maupun agen-agen perjalanan atau transportasi. **Baca Mayoritas... Hal 7**

IN SIGHT

Perusahaan kebanyakan modusnya dirumahkan. Jarang mem-PHK karena ada kewajiban yang mengikuti.

DENTA JULIAN
Sekretaris DPC KSPSI Kota Jogja

Mereka terpaksa beralih untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk anak-anak mereka yang masih sekolah."

MARGANINGSIH
Ketua Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia Regional Jogja dan Jateng

Sambungan dari hal 1

"Memang di organisasi kami ada beberapa sektor. Untuk sektor pertokoan, niaga, bank sudah berangsur-angsur pulih. Atau sektor rokok, tembakau, makanan, minuman juga sudah berangsur pulih," katanya usai rakor dengan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum lama ini.

Denta menjelaskan, pekerja terutama di sektor kuliner, wisata, perhotelan masih banyak di bawah radar, sehingga dinas tidak mengetahui posisi dan situasi mereka saat ini. "Tapi ketika kita berkomunikasi dengan mereka melalui sosmed (sosial media), banyak lagi yang sampai hari ini belum didata atau bahkan belum dipekerjakan kembali," ujarnya.

Pekerja khusus di sektor pariwisata itu yang dipekerjakan terbagi menjadi berbagai macam status. Ada pekerja yang permanen, kontrak, *outsourcing*, atau *daily worker*. Terutama pekerja kontrak ini yang terdampak tidak diperpanjang masa kontraknya. "Ada beberapa hotel yang hingga saat ini masih tidak beroperasi, bahkan sudah dipindah-tangankan, sehingga mereka tidak dapat kejelasan," jelasnya.

Menurutnya, persoalan ini cukup sistemik dan pelik. Pekerja yang berharap ingin dipanggil kembali hanya harap-harap cemas dan tidak ada kepastian dari perusahaan. Juga apakah mereka bisa bekerja di tempat atau perusahaan lain, masih menjadi persoalan.

Dari segi jaminan sosial, seperti BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan yang juga tak dibayarkan iurannya karena mereka dirumahkan, juga menjadi persoalan sendiri. "Karena perusahaan kebanyakan modusnya dirumahkan, nggak tahu manggilnya kapan dan mereka jarang mau mem-PHK karena

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui
☐ Untuk Diketahui

otomatis harus ada kewajiban yang mengikuti," terangnya.

Oleh karena itu, kebanyakan mereka memilih mundur dan hal ini menjadi persoalan tersendiri. Secara otomatis hak mereka sebagai pekerja selama ini hilang. Tentu saja karena mereka mengundurkan diri dan lebih dari 3-4 bulan tidak dipekerjakan. "Jadi kebijakannya merumahkan tidak ada kejelasan sampai kapan. Bahkan ada perusahaan sudah gulung tikar, mereka ditinggal begitu saja," ungkapnya.

Dengan demikian, kondisi ini perlu adanya aksi dari Pemkot Jogja untuk menanggulangi permasalahan ini. Sebab, ketika mereka dihadapkan dengan perusahaan, tidak mempunyai kekuatan apapun. Pemkot perlu menjaring persoalan yang pelik itu dari para pekerja di kota ini.

"Usulan kami, paling tidak pemkot membuka layanan terpadu bagi pekerja, baik yang berdomisili atau ber-KTP Jogja atau bekerja di perusahaan di Kota Jogja. Semacam layanan pengaduan dan pelaporan," terangnya.

Selain itu bisa melakukan pendataan kepada masing-masing perusahaan terkait pekerja yang terdampak dirumahkan. Atau membuka posko terpadu di beberapa titik, yang diharapkan akan mampu diakses oleh warga ketika mendapati ketidakjelasan nasib yang belum pulih dipekerjakan kembali.

"Harapan kami juga mengusulkan ke pemkot dan DPRD untuk bisa membuat semacam Satuan Tugas, tidak hanya yang bekerja di kesehatan, tapi juga mencoba menanggulangi dampak Covid-19 ini terhadap perekonomian terutama di tenaga kerja itu sendiri," tambahnya.

Pekerja Terdampak Butuh Pendampingan Usaha
Sekitar 70 persen pekerja di

Kota Jogja dari hampir seribu anggota serikat pekerja mandiri Indonesia regional Jogja dan Sleman, terdampak Covid-19. Mereka kehilangan pekerjaan utamanya, terutama khusus perhotelan dan restoran.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia Regional Jogja dan Jateng Marganingsih mengatakan, mereka saat ini masih mencari-cari pekerjaan atau beberapa usaha yang sesuai. Di antaranya ada yang terjun menjadi pekerja bangunan, membuka angkringan, jualan makanan sederhana maupun produk makanan *online*.

"Mereka terpaksa beralih untuk mencukupi kebutuhannya. Terutama untuk anak-anak mereka yang masih sekolah," katanya kepada *Radar Jogja* kemarin (25/10).

Marga menjelaskan, dari anggotanya memiliki dampak yang bermacam-macam. Di antaranya sekitar 40 persen pekerja ter-PHK dengan pesangon secara diam-diam dan mem-PHK dengan memberikan pesangon secara dicicil atau negosiasi. Ini termasuk pekerja permanen, terlebih yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun.

"Secara diam-diam itu misalnya mereka tidak memberikan keputusan, cuma menganjurkan kalau mencairkan JHT. Itu modus perusahaan seperti mem-PHK secara diam-diam," ujarnya.

Selain itu sekitar 20 persen pekerja dengan perjanjian kontrak sudah selesai, sehingga tidak diperpanjang atau dipanggil kembali bekerja. Dalam kasus ini ada yang dikontrak sampai tiga tahun berturut-turut yang semestinya menjadi karyawan permanen. Kemudian pekerja *unpaid leave* atau kadang-kadang masuk dan tidak sekitar 30 persen. Sisanya 10 persen yaitu *daily worker* yang sudah diberhentikan. (wia/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005